

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan maupun kegiatan bisnis yang melakukan operasi untuk menghasilkan laba memiliki ketakutan yang sama yaitu kesulitan keuangan atau *financial distress*. Platt dan Platt (2002) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Kesulitan keuangan atau *financial distress* dapat diantisipasi dengan strategi yang dapat diambil oleh manager perusahaan agar *financial distress* dapat ditekan dan tidak berpengaruh besar sehingga mengarah pada kondisi kebangkrutan atau kepailitan, dimana penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap perusahaan dapat menjadi fokus utama.

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 117/MBU/2002 mengutarakan bahwa penerapan *good corporate governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional,

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ,
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN,
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional,
5. Meningkatkan investasi nasional,
6. Mensukseskan program privatisasi.

Tujuan inilah yang menjadi alasan mengapa penerapan *corporate governance* sangat diperlukan perusahaan dalam upaya menekan potensi terjadinya *financial distress*, sehingga perusahaan yang memiliki kesulitan dalam keuangan memiliki indikasi bahwa penerapan mekanisme *corporate governance*-nya juga buruk. *The Australian Stock Exchange (ASX)* menjelaskan bahwa *corporate governance* dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan, dimana *corporate governance* mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dicapai perusahaan. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang

saham, dewan pengurus, para manager dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. *Organization for Economic Co-orporation and Development* (OECD) telah mengembangkan prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* tersebut yaitu, *Fairness* (Kewajaran), *Disclosure & Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas). Prinsip-prinsip inilah yang harus dijalankan manajemen dalam kegiatan perusahaan agar perusahaan dapat menerapkan *good corporate governance*.

Berdasarkan definisi diatas, terlihat bahwa penerapan *corporate governance* telah menjadi perhatian besar bagi perusahaan. Ananchotikul dan Eichengreen (2009), mengungkapkan bahwa kualitas *corporate governance* tidak hanya merupakan cerminan dari perkembangan keuangan, tetapi juga dapat mempengaruhinya secara positif. *The International Monetary Fund* (2014) melakukan analisis empiris dengan tujuan menemukan bukti di tingkat internasional bahwa beberapa indikator *corporate governance* bergantung pada tindakan pengambilan risiko di lembaga keuangan. Secara umum temuan mereka menunjukkan empat hasil utama :

- a) Semakin independen dewan direksi sehubungan dengan manajemen di lembaga keuangan, semakin rendah risiko yang diambil;
- b) Penegakan perangkat kepatuhan manajemen risiko pada umumnya merupakan penambah dari tindakan pengambilan risiko yang sehat di dalam lembaga keuangan;

- c) Gaji besar dikaitkan dengan risiko tinggi untuk lembaga keuangan kecil, sementara pembayaran terkait ekuitas umumnya menginduksi risiko lebih kecil.
- d) Pengambilan risiko tergantung pada kepemilikan lembaga oleh fakta bahwa kehadiran mereka dalam struktur pemegang saham lembaga keuangan biasanya mendominasi, karena itu kecenderungan untuk mengurangi risiko dalam tindakan mereka.

Penerapan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan BUMN menjadi sangat penting mengingat isu-isu pelanggaran *good corporate governance* yang terjadi di berbagai perusahaan BUMN. Sebagaimana pernyataan Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho yang mengatakan bahwa banyak kasus BUMN yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, diantaranya merupakan kasus penyuapan dan gratifikasi. Menurut Emerson, menjamurnya kasus korupsi di tubuh BUMN karena sistem pengawasan di jajaran direksi perusahaan lemah. Sebaliknya, program antikorupsi hanya diterapkan di level pelayanan atau manajemen bawah. Fungsi pengawasan internal tidak berjalan dengan baik akibat banyaknya posisi pengawas di BUMN yang rangkap jabatan, bahkan direksi atau komisaris tersebut tidak berasal dari kalangan profesional. Adapun beberapa kasus di lingkungan perusahaan BUMN yaitu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia menjadi tersangka suap pengadaan mesin dan pesawat, serta kasus korupsi Dirut Perusahaan Listrik Negara dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Namun, upaya pencegahan korupsi sudah ada dalam peraturan Menteri Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* pada BUMN. Akan tetapi, Emerson berpendapat bahwa lingkungan BUMN tidak

mendukung antikorupsi dikarenakan manajemen internal yang tidak sehat. (Angriani, 2019)

Good corporate governance dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. Dengan demikian, sejalan dengan pemikiran ini, BUMN juga semestinya mampu mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*. Akan tetapi, dalam kenyataannya BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya kurang begitu memperhatikan implementasi prinsip *good corporate governance*.

Berbagai studi di masa lalu telah menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki hubungan dengan *financial distress*. Penelitian Manzanueque, Priego dan Merino (2014) mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan non-institusional, dan *CEO duality* tidak berpengaruh pada *financial distress*. Kepemilikan dewan, *independent directors*, dan *board size* berpengaruh negatif pada *financial distress*. Shahwan (2015) menyatakan hasil penelitian tidak mendukung hubungan positif antara praktik *corporate governance* dan kinerja keuangan. Selain itu, ada hubungan negatif yang tidak signifikan antara praktik *corporate governance* dan kemungkinan *financial distress*. Terakhir, penelitian dari Jamal dan Shah (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan akan mengurangi tingkat kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan, dualitas CEO juga telah mengakibatkan penurunan kesulitan keuangan di perusahaan, dewan independensi juga telah mengakibatkan

penurunan kesulitan keuangan perusahaan sesuai hasil statistik. Selain itu, independensi komite audit tidak memiliki dampak pada kesulitan keuangan perusahaan di Pakistan. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai studi diatas ialah, pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* di berbagai negara dan perusahaan tidak semua berpengaruh signifikan dengan kemungkinan mengurangi terjadinya *financial distress*. Sehingga peneliti dirasa perlu untuk meneliti kembali pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* dengan variabel dan populasi yang berbeda.

Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan antara pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018. Studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti menambahkan variabel ukuran komite pemantau risiko untuk diteliti pengaruhnya terhadap *financial distress*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah penerapan mekanisme *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dengan studi kasus pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penerapan mekanisme *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dengan studi kasus pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

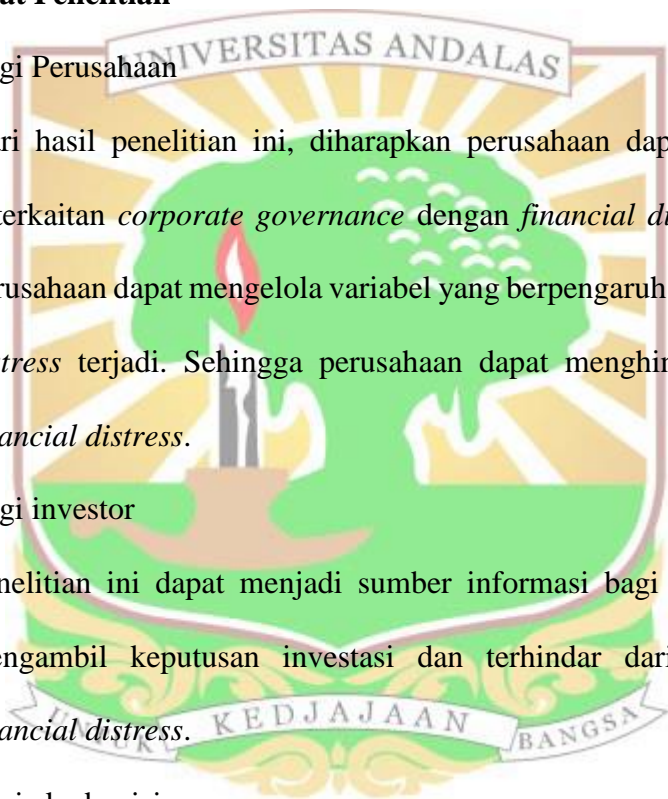
Dari hasil penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat menganalisa keterkaitan *corporate governance* dengan *financial distress* sehingga perusahaan dapat mengelola variabel yang berpengaruh ketika *financial distress* terjadi. Sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya *financial distress*.

2. Bagi investor

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi dan terhindar dari kemungkinan *financial distress*.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan bagi penelitian selanjutnya.



1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan menguji pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran komite pemantau risiko) terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN Non-Keluarga yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis

Bab III : METODA PENELITIAN

Pada bab ini berisi variabel penelitian, objek penelitian, metoda pengumpulan data dan metoda analisis data

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif, uji menilai kelayakan model, uji menilai keseluruhan model, uji koefisien regresi dan pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan dan saran.